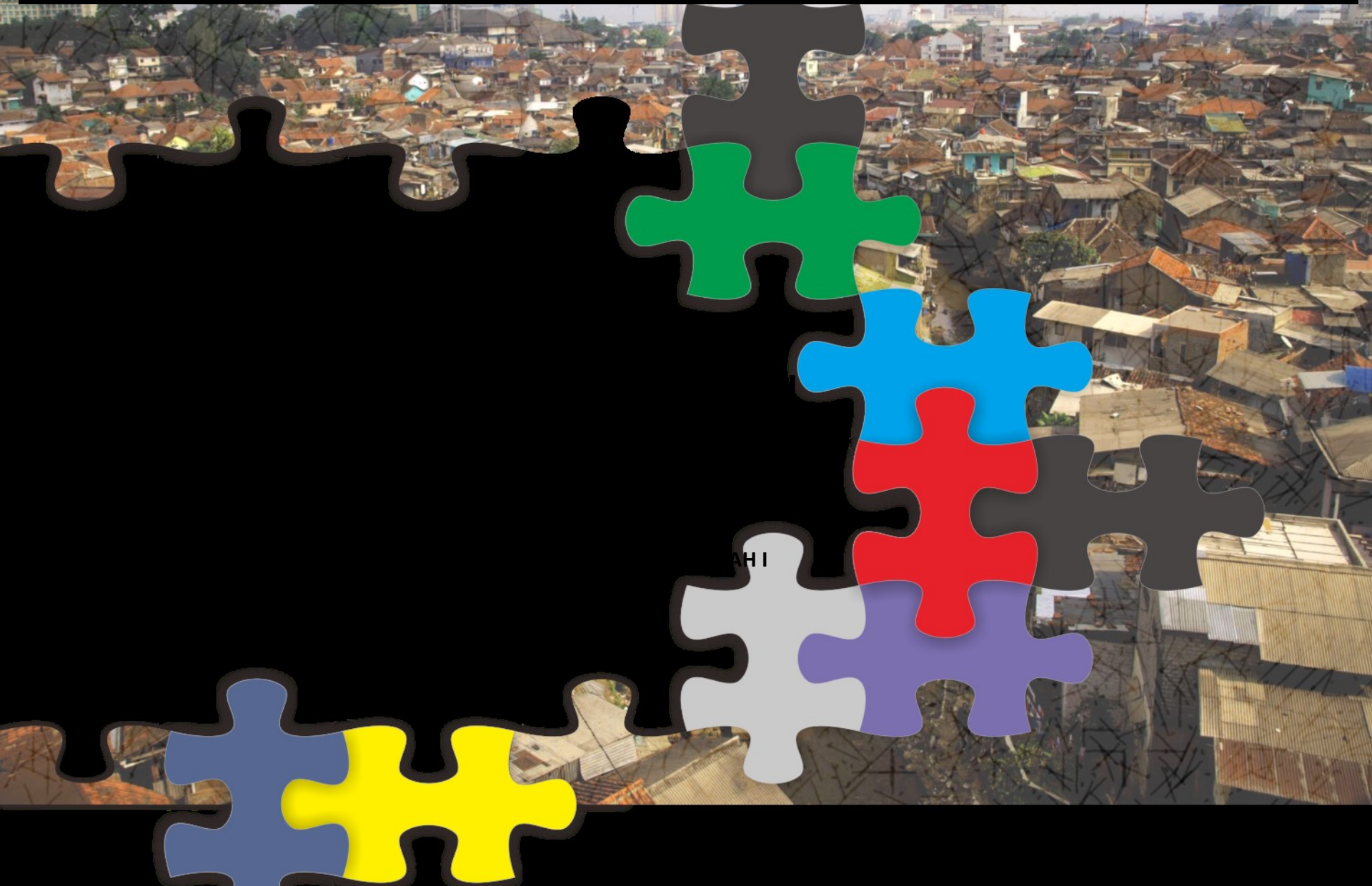
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT







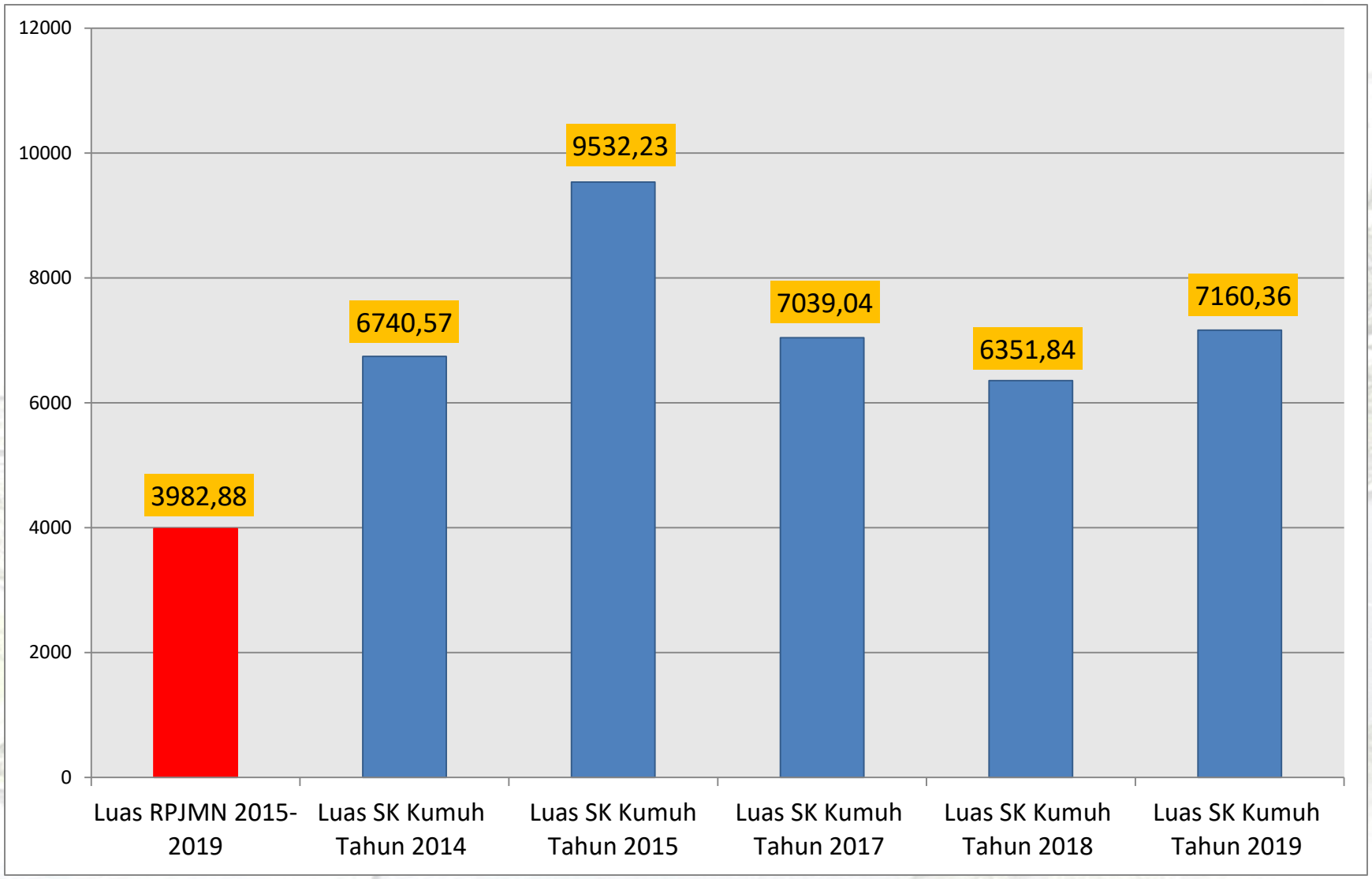



POTRET PERMUKIMAN KUMUH DI JAWA TENGAH

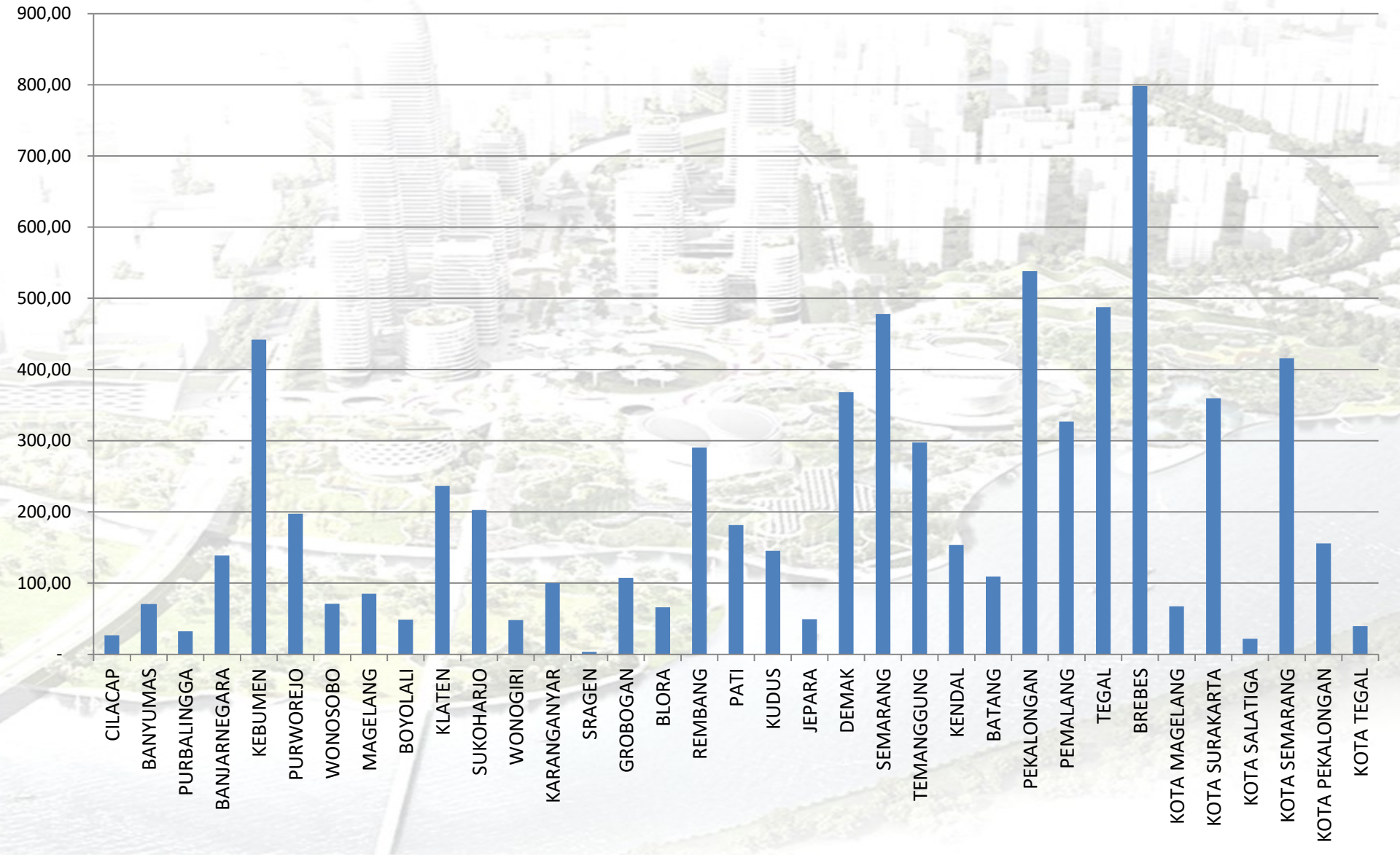





POTRET KUMUH DI JAWA TENGAH



LUAS KUMUH BERDASARKAN SK BUPATI / WALIKOTA (HA)



TARGET & REALISASI PENGURANGAN KUMUH TAHUN 2015-2019
PROV. JATENG



Target Pengurangan Kumuh menurut RPJMN 2015-2019 Provinsi Jawa Tengah **3.982,88** Ha

2015- 2917

Capaian
919,21 Ha
23 %

2018

Capaian
1.551,70 Ha
39 %

2019

Prediksi Capaian
1.113,53 Ha

Total Capaian 2015 – 2018
2.470,91 Ha

62 %

Sisa Kumuh Akhir Tahun
398,44 Ha

*) Sumber : SIM KOTAKU

KONDISI BASLINE DATA 100-0-100 DI JAWA TENGAH

Kabupaten	∑ Desa/Kel. Lokasi			Luas Kumuh	Keterangan
	Sudah Baseline	Belum Baseline	Jumlah		
Kab. Batang	8	0	8	109.364	
Kab. Blora	13	0	13	66.15	
Kab. Banjarnegara	16	0	16	138.69	
Kab. Demak	10	8	18	368.01	**Proses**
Kab. Boyolali	14	0	14	48.62	
Kab. Jepara	6	0	6	49.268	
Kab. Karanganyar	23	0	23	100.16	
Kab. Kendal	14	0	14	153.572	
Kab. Purworejo	11	0	11	197.41	
Kab. Sragen	3	0	3	3.6	
Kab. Tegal	22	0	22	487.78	
Kab. Wonogiri	6	0	6	47.98	
Kab. Temanggung	36	0	36	297.81	
Kab. Pemalang	26	0	26	326.82	
Kab. Semarang	15	0	15	477.92	
Kab. Pati	22	0	22	181.57	
Kab. Banyumas	10	0	10	69.58	
Kab. Rembang	19	0	19	290.45	
Kab. Pekalongan	35	0	35	538.2	
Kab. Wonosobo	5	0	5	70.834	
Kab. Brebes	34	88	122	798.32	**Proses**
Kab. Kebumen	42	0	42	442.072	
Kab. Purbalingga	5	0	5	32.39	
Kab. Sukoharjo	30	0	30	202.567	
Kab. Klaten	13	0	13	236.5	
Kab. Magelang	9	0	9	85.09	
Kota Tegal	11	0	11	39.53	
Kab. Cilacap	8	0	8	26.88	
Kab. Grobogan	17	0	17	107.32	
Kab. Kudus	51	0	51	145.406	
Kota Semarang	62	0	62	415.93	
Kota Pekalongan	13	0	13	155.82	
Kota Magelang	17	0	17	67.405	
Kota Salatiga	4	0	4	21.84	
Kota Surakarta	51	0	51	359.55	
JUMLAH	**681**	**96**	**777**	**7160.41**	

Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

SK KUMUH BUPATI/ WALIKOTA DILENGKAPI DENGAN

Tabel Daftar Lokasi

Yang telah di verifikasi oleh **Pemerintah Pusat** dan **Pemerintah Daerah Provinsi**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 650/024.1/2019
TANGGAL 18 Februari 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 650/155.A/2014 TENTANG LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA TEGAL

LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA

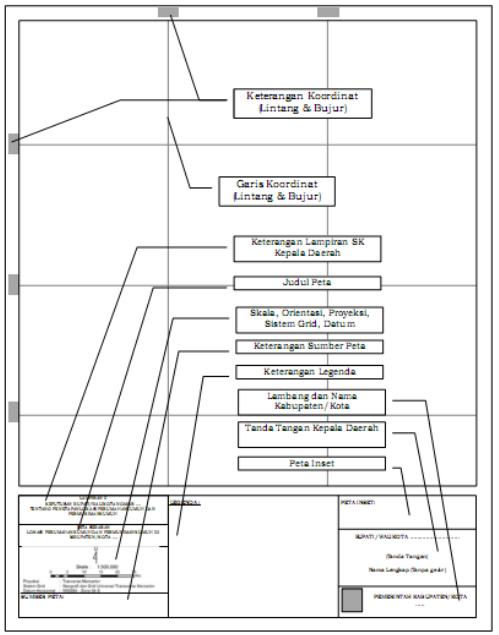
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TINGKAT KEKUMUHAN	LUAS WILAYAH KUMUH (Ha)
1.	TEGAL BARAT	DEBONG LOR	-	-
2.	TEGAL BARAT	KEMANDUNGAN	KUMUH RINGAN	0,82
3.	TEGAL BARAT	KRATON	KUMUH RINGAN	0,41
4.	TEGAL BARAT	MUARAREJA	KUMUH RINGAN	9,14
5.	TEGAL BARAT	TEGALSARI	KUMUH RINGAN	4,91
6.	TEGAL BARAT	PESURUNGAN KIDUL	KUMUH RINGAN	2,48
7.	TEGAL TIMUR	KEJAMBON	KUMUH RINGAN	1,16
8.	TEGAL TIMUR	MANGKUKUSUMAN	KUMUH RINGAN	0,54
9.	TEGAL TIMUR	MINTARAGEN	KUMUH RINGAN	9,66
10.	TEGAL TIMUR	PANGGUNG	KUMUH RINGAN	5,18
11.	MARGADANA	PESURUNGAN LOR	KUMUH RINGAN	5,23
TOTAL				39,53

WALI KOTA TEGAL,

MOHAMAD NURSHOLEH

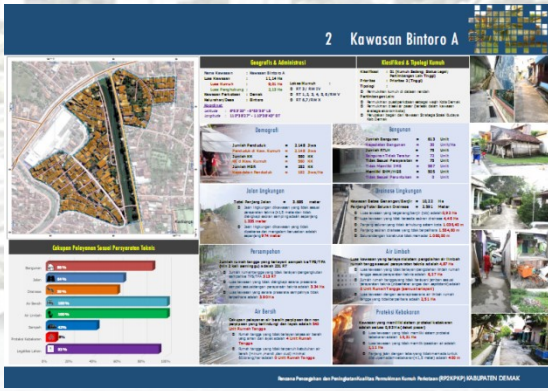
Peta Sebaran Lokasi

3. Peta Sebaran Lokasi



Buku Profil Lokasi

Hasil **Pendataan numerik** dan **penilaian lokasi** untuk tiap lokasi



Latar Belakang Baseline



Pembangunan & Pengembangan Perumahan Permukiman

LANDASAN UTAMA: UU No.1 Tahun 2011 (Pasal 94 sd 95)

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

- **Pengawasan dan pengendalian;**
- **Pemberdayaan Masyarakat.**

Permasalahan Umum Kawasan Permukiman Kumuh

- Kepadatan Bangunan yang tinggi;
- Kondisi Prasarana dan Sarana yang buruk secara kuantitatif dan kualitatif;
- Kondisi Lingkungan yang tidak didukung oleh sistem drainase;
- Tidak memiliki keteraturan struktur permukiman;
- Permukiman di bantaran sungai;
- Areal yang terpengaruh secara fisik oleh adanya pengelolaan limbah oleh pabrik di sekitarnya.

PENYUSUNAN DATABASE KAWASAN KUMUH & POLA PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Penanganan kumuh di perkotaan merupakan salah satu **agenda** yang terdapat dalam **Renstra Kementerian PU, Ditjen Cipta Karya**, dimana upaya penanganan kumuh melalui **pendekatan kawasan** dalam mengurangi luasan kawasan kumuh yang ada dan **mendukung program SDGs**
2. Perlunya **akurasi data dan relevansi** yang sesuai serta framing lokasi dalam konteks keterpaduan penanganan kawasan menjadi sangat penting untuk menjadi **dasar/ *readiness criteria* pembangunan.**
3. Justifikasi dan relevansi kriteria kawasan kumuh yang terdapat dalam **payung hukum** dan **ketetapan formal** terkait kawasan kumuh oleh Pemda berupa Surat Keterangan (SK) Daerah.
4. Diperlukannya **pemutakhiran data** kawasan kumuh berdasarkan SK Daerah (sesuai Amanat **Pasal 98 Undang-Undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, RPIJM, SPPIP,** dan **RPKPP**).

FORMAT NUMERIK DALAM PENETAPAN LOKASI KUMUH SESUAI PERMEN PUPR NO 14/PRT/M/2018

Tabel 2. Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	:		Luas SK	:	Ha
Kelurahan	:		Luas Verifikasi	:	Ha
Kecamatan	:		Jumlah Bangunan	:	Unit
Kab/Kota	:		Jumlah Penduduk	:	jiwa
Provinsi	:		Jumlah KK	:	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

			Numerik	
1	Aspek Kondisi Bangunan Gedung			
a.	Ketidakteraturan Bangunan	■ Jumlah bangunan tidak teratur	.....	Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	■ Luas kawasan dg kepadatan > 200/250 unit/ha	.....	Ha
c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	■ Jumlah bangunan tdk sesuai teknis	.....	Unit
2	Aspek Kondisi Jalan Lingkungan			
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	■ Panjang jalan ideal (standar minimal)	.....	m'
		■ Panjang jalan eksisting	.....	m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	■ Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk	.....	m'
3	Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum			
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	■ Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	.....	KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	■ Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	.....	KK
4	Aspek Kondisi Drainase Lingkungan			
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	■ Luas kawasan yang terkena genangan	.....	Ha
		■ Panjang drainase ideal (standar minimal)	.....	m'
b.	Ketidaktersediaan Drainase	■ Panjang saluran drainase eksisting	.....	m'
c.	Kualitas Konstruksi Drainase	■ Panjang saluran drainase rusak	.....	m'

Format numerik menjadi lampiran SK Kumuh Bupati/Walikota yang di susun melalui **proses identifikasi** dan dilakukan oleh **Pemerintah Daerah (pasal 31 ayat 1)**

FORMAT PENILAIAN LOKASI DALAM PENETAPAN KUMUH SESUAI PERMEN PUPR NO 14/PRT/M/2018

Tabel 3. Formulasi Penilaian Lokasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: • untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha • untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha	• 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			• 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			• 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: • pengendalian dampak lingkungan • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • keselamatan bangunan gedung • kesehatan bangunan gedung	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi	1	

Peninjuan Ulang SK Kumuh

SK KUMUH BUPATI/ WALIKOTA yang sudah di tetapkan

Ditinjau Ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun



Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Pasal 38



Pelaku:

Pemerintah daerah

Tujuan:

Untuk Menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan permukiman kumuh

Sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan serta pengurangan tingkat kekumuhan

Hasil peninjauan ulang ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati/walikota atau gubernur untuk DKI Jakarta

FORMAT DAFTAR LOKASI VERRIFIKASI PENINJAUAN ULANG SESUAI PERMEN PUPR NO 14/PRT/M/2018

2. Format Daftar Lokasi yang Terverifikasi

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA .....

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN /DISTRIK	JUMLAH	KEPA-DATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
1	Dabag	1,86	05/08	Condongcatur	Depok	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 46' 16,71"	7° 46' 16,71"	46	Sedang	9	Tinggi	Legal	B1/ 2
2	Ngropoh	0,52	04/24	Condongcatur	Depok	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 45' 48,41"	110° 24' 14,19"	35	Ringan	5	Sedang	Legal	C3 / 6
3															
dst															

Mengetahui,

Tim Verifikasi Pusat	Tim Verifikasi Provinsi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi (Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota (Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
.....	.....	.....

Sumber: Tim Penyusun, 2017

FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG SESUAI PERMEN PUPR NO 14/PRT/M/2018

D. FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG

Tabel 5. Formulasi Hasil Peninjauan Ulang

Provinsi	=	Luas SK	=	Ha	
Kab. /Kota	=	Luas Verifikasi	=	Ha	
Kecamatan	=	Jumlah Bangunan	=	Unit	
Kawasan	=	Jumlah Penduduk	=	Jiwa	
		Jumlah KK	=	KK	

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5		Unit					Unit		Unit		
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3											
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1											
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5		Ha					Ha		Ha		

Kondisi Kekumuhan	
60 – 80	Kumuh Berat
38 – 59	Kumuh Sedang
16 – 37	Kumuh Ringan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH



TERIMA KASIH

Bersama Kita Berkolaborasi
Mewujudkan Kota Layak Huni Dan Berkelanjutan